

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah atau negara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakan harus lebih merata dan tidak menimbulkan perbedaan pembangunan antar daerah atau wilayah (Andina & Supriyanto, 2021). Permasalahan ini juga dihadapi oleh Indonesia sebagai negara berkembang mengalami permasalahan klasik yaitu ketimpangan pendapatan. Salah satu faktor penyebab ketimpangan ekonomi karena perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi populasi ada di setiap daerah. Artinya, di setiap daerah terdapat kesenjangan warga yang berpendapatan relatif lebih tinggi dengan yang berpendapatan rendah (Fahrizal et al., 2019).

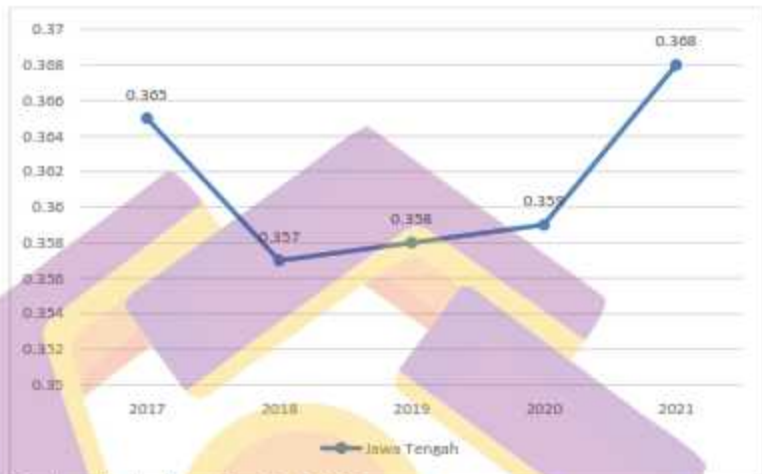
Ketimpangan pendapatan di Indonesia bukan menjadi permasalahan yang baru, karena ketimpangan juga terjadi pada negara berkembang bahkan negara maju. Namun ketimpangan di negara berkembang dan negara maju sangat berbeda yang terletak pada proporsinya dan besar tingkat nilai ketimpangan serta kesulitan negara dalam mengatasinya. Secara umum nilai ketimpangan berkisar dari 0,55 hingga 0,70, tergantung pada pemilihan menggunakan ukuran tersebut. Tingkat ketimpangan global yang tinggi

mencerminkan pendapatan per kapita yang besar, ketidaksetaraan antar negara menyumbang sekitar tiga perempat dari ketidaksetaraan global. Rata-rata ketimpangan di negara berkembang tetap stabil, meskipun pada tingkat yang jauh lebih tinggi daripada di negara maju (Dabla et al., 2015).

Pulau Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Indonesia tidak terlepas dari masalah ketimpangan pendapatan, hal ini dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antar wilayah yang menyebabkan beberapa wilayah belum merata (Kusumaningrum, 2020). Ketidakmerataan ini mengakibatkan kemampuan daerah untuk tumbuh lebih cepat atau tumbuh lambat. Parameter untuk menghitung tingkat ketimpangan pendapatan suatu daerah yaitu menggunakan indeks gini rasio. Indeks gini rasio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan secara menyeluruh. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat menjelaskan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva Lorenz dan aspek matematis (Nur Hidayah & Tallo, 2020).

Indeks gini sebagai ukuran ketidakmerataan agregat dan nilainya terletak antara 0 (kemerataan sempurna) sampai 1 (ketidakmerataan sempurna). Terdapat tiga tahapan ketimpangan pendapatan yaitu jika nilai indeks gini terletak diantara 0,2-0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata), sedangkan jika nilai indeks gini terletak antara 0,35-0,49 menunjukkan ketimpangan sedang, sementara nilai indeks gini terletak antara 0,50-0,70 menandakan pemerataan sangat timpang.

Berikut grafik perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah tahun 2017-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 1.1 Grafik Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa tahun 2017 mengawali indeks gini dengan nilai 0,365. Kemudian pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,357 dan mengalami kenaikan lagi tahun 2019 sebesar 0,358 lalu menjadi 0,359 pada tahun 2020. Namun di tahun 2021 ketimpangan mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,368 akibat terjadi pandemi covid-19. Pandemi covid-19 yang terjadi berimbas pada sektor perekonomian karena keadaan ekonomi dalam kondisi tidak stabil.

Provinsi Jawa Tengah menunjukkan nilai indeks gini tingkat ketimpangan sedang yaitu berkisar antara 0,35-0,49. Pada tahun 2018 provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan indeks gini dibandingkan

dengan tahun 2017. Hal ini dikarenakan terjadi penurunan tingkat pengangguran sebanyak 1,22% dan diimbangi terjadinya peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 0,28%. Kemudian pada tahun 2019 hingga 2021 terjadi peningkatan indeks gini yang disebabkan adanya pandemi covid-19 (Purwanto, 2020). Pandemi Covid-19 telah menurunkan permintaan domestik dan ekspor, mengurangi konsumsi domestik dan melemahkan perkembangan bisnis terutama industri manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pariwisata konstruksi.

Pada tahun 2021 nilai indeks gini mengalami kenaikan dari 0,359 menjadi 0,368 di karenakan Jawa Tengah masih mengalami perubahan kondisi akibat pandemi Covid-19 dan juga mempengaruhi setiap aspek pemerintahan. Hal ini berdampak pada krisis multisektoral yang mengakibatkan pemerintah provinsi Jawa Tengah tidak mampu memenuhi indikator kinerja. Ketimpangan distribusi pendapatan ini menjadi masalah penting yang perlu ditangani di daerah, karena dampaknya tidak hanya dari segi ekonomi melainkan dari segi sosial (Kuncoro et al., 2021).

Ketimpangan pendapatan seringkali terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini terjadi pada daerah Provinsi Jawa Tengah, secara umum yang ditinjau dari pengembangan ekonomi wilayah pedesaan termasuk dalam zona pertanian khususnya petani padi untuk dihasilkan beras. Sedangkan untuk wilayah perkotaan sebagian besar bekerja pada sektor jasa dan manufaktur, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan wilayah menjadikan perkotaan cenderung memiliki ketimpangan yang lebih besar

dibandingkan dengan pedesaan (Khoirudin & Musta'in, 2020).

Perbedaan tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi wilayah kabupaten dan kota di Jawa Tengah salah satunya di pengaruhi oleh pendapatan perkapita. Pada tahun 2021 pendapatan perkapita di wilayah pedesaan yang diukur atas harga konstan berkisar mencapai 24 juta rupiah, sedangkan untuk wilayah perkotaan mencapai 54 juta rupiah (Susanti & Wicaksono, 2019). Hal ini dikarenakan wilayah pedesaan di Jawa Tengah yang menjadi sektor utama yaitu sektor pertanian. Mata pencaharian sektor ini melibatkan hampir setengah dari tenaga kerja yang terserap. Luas hutannya mencapai 20% dari luas Provinsi Jawa Tengah, merupakan kawasan hutan khususnya Rembang, Blora dan Grobogan di wilayah utara dan selatan yang semuanya merupakan daerah penghasil kayu jati (Miftakudin et al., 2019).

Sedangkan untuk wilayah perkotaan berfokus pada industri besar dan menengah. Seperti kawasan Semarang-Ungaran-Demak-Kudus merupakan kawasan industri utama Jawa Tengah. Kabupaten Kudus dikenal sebagai sentra industri rokok. Terdapat industri semen di Kabupaten Cilacap. Kota Solo, Kota Pekalongan, Juwana dan Lasem dikenal sebagai kota batik, dan kota-kota ini sarat dengan nuansa klasik. Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (persimpangan Jawa Timur dan Jawa Tengah) memiliki cadangan minyak dan dikenal sebagai daerah pertambangan minyak (Purnamawati & Khoirudin, 2019).

Salah satu faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan yaitu tenaga kerja. Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk yang tinggi

mencapai 36.742.501 juta jiwa (BPS, 2021). Perkembangan jumlah penduduk akan diikuti oleh penambahan jumlah tenaga kerja. Tenaga kerja terdiri dari penduduk yang sedang atau sedang bekerja, mencari pekerjaan, dan melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus keluarga. Pencari kerja ada tiga jenis yaitu mereka yang bersekolah dan mengurus keluarga, meskipun tidak bekerja namun secara fisik mampu dan dapat bekerja kapan saja. Ketimpangan yang muncul dapat dilihat dari perbedaan jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja, dan kesenjangan ini berdampak pada pengangguran. Berikut merupakan grafik perkembangan tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021,



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 1.2 Grafik Tenaga Kerja (Juta Jiwa) Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa perkembangan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi berdasarkan status pekerjaan. Berusaha sendiri adalah bekerja atau

berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta, tidak menggunakan pekerja yang dibayar atau tidak dibayar, termasuk mereka yang sifat pekerjaannya memerlukan keterampilan atau keahlian khusus. Contoh berusaha sendiri yaitu wiraswasta, dokter/bidan yang membuka klinik, makelar tanah/rumah, dll (BPS, 2021).

Selama lima tahun terakhir tenaga kerja yang berusaha sendiri pada tahun 2020-2021 mengalami penambahan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 313.820, hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan kreativitas dan inovasi orang yang bekerja. Selain itu jenis pekerjaan lainnya dengan berusaha dibantu buruh tidak tetap berarti bekerja atau berusaha atas resiko sendiri dan menggunakan pekerja dibayar dan sementara. Buruh tidak tetap yaitu bekerja pada orang lain atau perusahaan dan hanya dibayar berdasarkan jam kerja atau jumlah pekerjaan yang dilakukan (Ramdani et al., 2021).

Selama lima tahun terjadi penambahan dan penurunan jumlah tenaga kerja. Terjadinya kenaikan terbesar pada tahun 2020 sebesar 280.709 dikarenakan pandemi yang mengakibatkan banyaknya pekerja yang mencari tambahan pekerjaan untuk pemasukan pendapatan. Sebaliknya berusaha dibantu buruh tetap yaitu bekerja atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh yang dibayar. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena adanya pengurangan pekerja yang diakibatkan covid-19 dan menyebabkan penurunan pendapatan (Widjajanto & Agus, 2020).

Buruh/pegawai/karyawan adalah orang yang bekerja tetap pada orang lain atau perusahaan dengan menerima gaji berupa uang atau barang. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang paling banyak tenaga kerja, hal ini dikarenakan para pekerja sudah terjamin pendapatan yang akan didapatkan dalam sebulan. Setiap tahunnya profesi ini mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2017-2021. Kemudian untuk pekerja bebas yaitu seseorang yang bekerja pada orang lain yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) dengan menerima upah atau balas jasa baik harian maupun borongan berupa uang atau barang. Sedangkan pekerja keluarga adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang (Setijawan et al., 2021).

Banyaknya jumlah tenaga kerja yang diklasifikasikan berdasarkan status membuat adanya perbedaan tingkat upah yang diterima oleh masyarakat. Hal ini menjadikan upah sebagai faktor yang mempengaruhi dikarenakan peningkatan tenaga kerja setiap serta kebutuhan konsumsi sehari-hari penduduk akan meningkat setiap tahun (Hermawan et al., 2017). Dalam penetapan upah minimum, pemerintah menetapkannya berdasarkan kebutuhan hidup layak, indeks harga konsumen, kemampuan mengembangkan dan mempertahankan usaha, serta tingkat upah minimum wilayah, kondisi pasar tenaga kerja dan pendapatan per kapita regional. Berdasarkan itu semua, pemerintah meninjau dan menetapkan tingkat upah minimum untuk setiap daerah dan kapan pemerintah akan menaikkan tingkat



upah minimum untuk daerah tertentu (Sugiharti & Kurnia, 2018). Berikut merupakan grafik perkembangan upah minimum di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 1.3 Grafik Upah Minimum Provinsi (Juta Rupiah) Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 upah minimum ditetapkan sebesar Rp1.367.000, kemudian adanya kenaikan pada tahun 2018 menjadi Rp1.486.065 lalu meningkat kembali menjadi Rp1.605.396 pada tahun 2019. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebesar Rp1.742.015 dan pada tahun 2021 upah minimum dinyatakan mengalami kenaikan sebesar Rp1.798.979.

Penetapan upah minimum provinsi pada tahun 2017 oleh Gubernur Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 560/46 tanggal 1 November 2016. Keputusan ini sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 78 Tahun 2015 tentang Gaji Negara, yang menetapkan perlunya pelaksanaan keputusan

Gubernur terhadap UMP Jateng Tahun 2017 sebesar Rp1.367.000 (Jatengprov, 2022). Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 1.605.396 untuk tahun 2019. Keputusan UMP Jateng Tahun 2019 yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/62 Tahun 2018 berlaku efektif mulai 1 Januari 2019 yang menjelaskan berdasarkan PP 78 Tahun 2015. Model penggajian ada dua, dengan UMP atau UMK. Tahun ini, Departemen Tenaga Kerja menetapkan kenaikan UMP sebesar 8,03 persen. Dengan kenaikan tersebut, maka UMP Jateng tahun 2018 sebesar Rp1.486.065 naik menjadi Rp1.605.396 (Winarto et al., 2022).

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp 1.605.396. Keputusan UMP Jateng Tahun 2019 dalam Surat Keputusan Nomor 560/62 yang dikeluarkan Gubernur Jateng Tahun 2018 berlaku mulai 1 Januari 2019. Sedangkan pada tahun 2020 sebesar Rp1.742.015,22. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp 136.000 dari tahun sebelumnya (Ratnasari et al., 2021). Kemudian pada tahun 2021 sesuai dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No 11/HK04/X/2020 tentang penetapan upah minimum 2021 akibat pandemi covid-19. Kenaikan upah minimum di Provinsi Jawa tengah disebabkan oleh inflasi *year of year* pada September sebesar 1,42 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah sebesar 1,85 persen dengan data tersebut terdapat kenaikan sebesar 3,27 persen, sehingga berdasarkan data angka tersebut upah minimum di Jawa Tengah di naikkan (Putri et al., 2022).

Upah memiliki peran penting dalam tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran para pekerja. Penetapan upah yang terus meningkat dapat berpotensi dalam penurunan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan penerimaan pendapatan di setiap masyarakat dapat menyebabkan perbedaan jumlah konsumsi. Secara umum, semakin tinggi pendapatan (kesejahteraan), maka semakin rendah bagian yang dibelanjakan untuk makanan dan semakin tinggi bagian yang dibelanjakan untuk bukan makanan. Rumah tangga yang berpendapatan tinggi (kaya) menggunakan sebagian pendapatannya untuk mengkonsumsi barang-barang bukan makanan. Hal ini tentu sangat berbeda dengan rumah tangga miskin, dimana pendapatan yang diterima hanya dapat digunakan untuk mengkonsumsi makanan (Hariani, 2019). Berikut merupakan grafik perkembangan pengeluaran per kapita makanan dan non makanan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

**Gambar 1.4 Pengeluaran Konsumsi PerKapita Makanan dan Non Makanan Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pengeluaran per kapita pada tahun 2017-2021 mengalami fluktuasi. Pengeluaran per kapita di Jawa Tengah paling tinggi yaitu pengeluaran konsumsi non makanan. Pengeluaran konsumsinon makanan berupa kesehatan, pendidikan, asuransi, investasi, dan pajak. Masyarakat yang dalam kehidupan akan terus meningkatkan proporsi konsumsinya sebanding dengan tingkat pendapatan yang diterimanya. Pendapatan yang meningkat tidak menciptakan untuk meningkatnya jumlah makanan yang dikonsumsi, karena pada dasarnya kebutuhan manusia akan makanan sudah jenuh.

Makanan adalah jumlah yang relatif terbatas sedangkan konsumsi non makanan relatif tidak terbatas. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak pengeluaran yang ditransfer dari makanan ke pengeluaran lain. Hal ini digunakan sebagai salah satu indikator dengan asumsi bahwa penurunan proporsi pangan mencerminkan penurunan ketimpangan (John Jaya Abdillah et al., 2019). Selama lima tahun konsumsi makanan penduduk di Provinsi Jawa Tengah mengalami meningkat. Peningkatan konsumsi pangan dikarenakan adanya aspek ketahanan pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat. Kisaran konsumsi pangan dan keragaman konsumsi pangan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi pangan masyarakat adalah beras. Fenomena pandemi tidak mengurangi masyarakat dalam mengkonsumsi makanan dan jika dilihat berdasarkan tabel di atas mengalami peningkatan yang cukup tinggi (Anandhiya et al., 2021). Pada tahun 2021 Kementerian Perindustrian bersiap menyambut konsumsi masyarakat yang

diperkirakan akan meningkat setelah vaksin. Hal ini dikarenakan masa transisi pandemi pasca covid-19, pandemi yang berlangsung mengubah pola konsumsi masyarakat. Perubahan kebiasaan konsumen telah mendorong industri makanan dan minuman untuk lebih giat mengembangkan inovasi seperti pemanfaatan teknologi digital yang memudahkan konsumen.

Penggunaan konsumsi non makanan selalu lebih tinggi dari konsumsi makanan karena adanya kebutuhan masyarakat yang semakin bermacam-macam, sehingga mengakibatkan pola konsumsi masyarakat mengalami pergeseran, yang di mana awalnya lebih besar untuk makanan bergeser kepengeluaran non-makanan. Secara makro, meningkat konsumsi merupakan hal yang positif karena mencerminkan peningkatan daya beli tinggi. Pada tahun 2017-2021 konsumsi non makanan terus meningkat, hal ini dikarenakan adanya perubahan pendapatan yang diperoleh sehingga setelah kebutuhan konsumsi makanan terpenuhi maka adanya sisa pendapatan akan dialihkan untuk kesehatan, pendidikan, asuransi, investasi, dan pajak (Devi Mulia, 2020).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putri et al.,2015) menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Arif & Wicaksana, 2017) menyatakan bahwa tenaga kerja tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh (Abdulah, 2013) menyatakan upah minimum berpengaruh terhadap

ketimpangan pendapatan. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Riandi & Varlitya, 2020) menyatakan bahwa variabel upah minimum menunjukkan pengaruh negatif terhadap ketimpangan. Penelitian yang dilakukan oleh (S. Dai et al., 2023) menyatakan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan (*novelty*) antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, namun pada penelitian sebelumnya memiliki karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada ketimpangan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan PDRB atas harga berlaku dalam tiap tahunnya, akan tetapi belum bisa untuk menurunkan ketimpangan. Dalam penelitian ini menggunakan variabel dependen dengan analisis data panel dari tahun 2017-2021. Kemudian pada penelitian ini memasukkan variabel pada masing-masing penelitian seperti tenaga kerja, upah minimum, dan pengeluaran konsumsi perkapita untuk dihubungkan dengan variabel dependen ketimpangan pendapatan. Hal ini untuk mengetahui apakah variabel yang digabung memiliki hubungan yang sama atau tidak dengan penelitian sebelumnya, selain itu juga yang menjadi pembeda penelitian ini dari segi objek yang menggunakan provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas terkait pengaruh variabel bebas tenaga kerja, upah minimum kab/kota, pengeluaran konsumsi perkapita makanan dan non makanan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Di Provinsi Jawa Tengah”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Ketimpangan pendapatan masih menjadi permasalahan ekonomi, hal ini dikarenakan peningkatan PDRB atas harga berlaku dalam tiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi belum bisa untuk menurunkan ketimpangan. Rata-rata tingkat ketimpangan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kategori sedang. Oleh karena itu perlu adanya kajian untuk menurunkan tingkat ketimpangan menjadi rendah. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui variabel yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah tahun 2017-2021. Berdasarkan latar belakang pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut,

1. Bagaimana pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran konsumsi perkapita makanan dan non makanan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh tenaga kerja, upah minimum kab/kota, dan pengeluaran konsumsi perkapita makanan dan non makanan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut,

1. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh upah minimum kab/kota terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran perkapita makanan dan non makanan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, UMK, dan pengeluaran konsumsi perkapita makanan dan non makanan secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut,

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagaimana peran masyarakat penting dalam membantu menurunkan tingkat ketimpangan yang nantinya akan menambah kesejahteraan di daerah sekitar.

2. Bagi Pemerintahan



Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan pembandingan dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan pengaruh tenaga kerja, upah minimum, dan pengeluaran per kapita terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literasi bagi mahasiswa terkait bahasan pengaruh tenaga kerja, upah minimum, dan pengeluaran per kapita terhadap ketimpangan pendapatan.

### 4. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan serta memperoleh gelar sarjana di Universitas Amikom Yogyakarta. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait pengaruh tenaga kerja, upah minimum, dan pengeluaran per kapita terhadap ketimpangan pendapatan.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian yang disusun dalam penelitian ini sebagai berikut,

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Latar belakang masalah menguraikan landasan pemikiran secara garis

besar. Rumusan masalah menguraikan pernyataan tentang fenomena yang memerlukan pemecahan melalui penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian menguraikan hasil penelitian yang dicapai melalui proses penelitian. Sistematika penulisan menjelaskan tentang ringkasan isi dari setiap bab dalam skripsi.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teori dan penelitian terdahulu menguraikan tentang penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Kerangka pemikiran merupakan skema dalam bagan yang dibuat untuk memaparkan secara ringkas tentang permasalahan yang diteliti. Hipotesis merupakan pernyataan yang disimpulkan dari tinjauan serta jawaban sementara dari masalah penelitian.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini merupakan uraian tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengumpulan data dan pengolahan data. Uraian tersebut mengenai objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan uraian tentang analisis data sesuai dengan alat dan teknik analisis yang digunakan. Pembahasan menggunakan hasil analisis sesuai dengan teknik yang digunakan serta argumentasi.

## BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan uraian tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian pengolahan data dan saran.

